

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Penelitian Kebebasan Baragama dan Hak-Hak Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah dilakukan di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Deskripsi wilayah penelitian disini memberikan gambaran mengenai keadaan geografis dan keadaan wilayah di Kabupaten Kendal serta memberikan deskripsi tentang Jemaat Ahmadiyah.

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 3 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas sekitar 1.002,23 km². Secara administratif Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Posisi geografis terletak pada 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan. Peta administratif Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 2.1. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 Kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri dari 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.140 dukuh, 1.490 RW dan 6.351 RT. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terletak pada Kecamatan Singorojo dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil terletak pada Kecamatan Ringinarum. Wilayah Kendal terbagi

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Menurut data dari Kendal dalam angka tahun 2016, dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2015, 70% digunakan untuk usaha pertanian (sawah dan tegalan) dan hutan untuk perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya) dan lain-lain.

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2015 sebanyak tercatat sebanyak 952.966 jiwa, terdiri atas 481.106 (50,14 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja dengan jumlah penduduk 69.219 (7,26%). Sedangkan Kecamatan Plantungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 32.287 jiwa (3,239%).

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

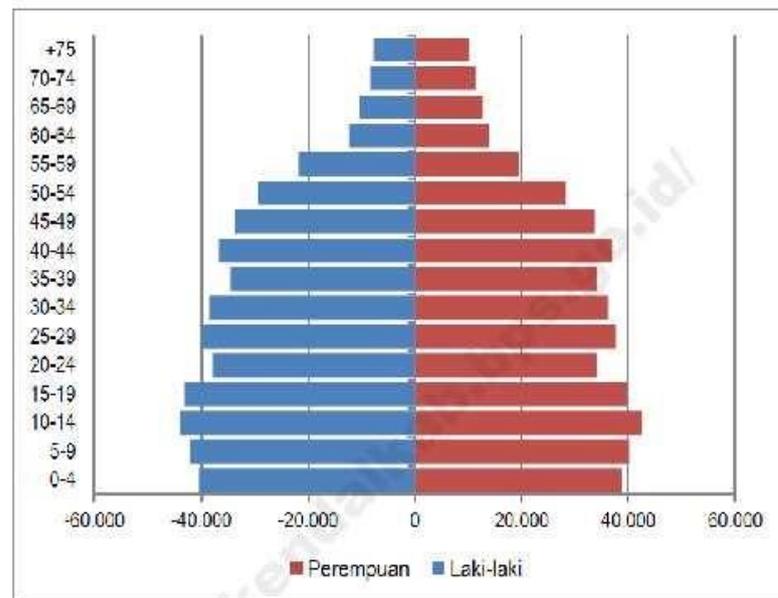
No	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Plantungan	16.689	16.072	32.761
2	Sukorejo	18.506	17.652	36.158
3	Pageruyung	30.414	29.183	59.697
4	Patean	25.952	24.952	50.904
5	Singorojo	25.258	24.726	49.984
6	Limbangan	26.461	15.826	32.287
7	Boja	34.894	34.325	69.219
8	Kaliwungu	29.279	28.913	58.192
9	Kaliwungu Selatan	23.623	22.983	46.606
10	Brangsong	18.072	18.386	36.458
11	Pegandon	24.757	24.623	49.380
12	Ngampel	28.811	28.551	57.015
13	Gemuh	25.206	25.456	50.662

14	Ringinarum	28.722	28.293	57.015
15	Weleri	27.736	27.091	54.827
16	Rowosari	25.480	25.418	50.898
17	Kangkung	24.063	23.953	48.016
18	Cepiring	17.526	17.107	34.633
19	Patebon	16.596	16.569	33.525
20	Kota Kendal	22.556	21.826	44.382

Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kendal sebesar 951 jiwa per km². Penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Ringinarum (2.426 jiwa/km²). Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah kecamatan Limbangan (450 jiwa/km²). Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2014 (data tahun 2015 belum tersedia data perkelompok umur) terbanyak berada pada strata 10-14 tahun, dengan jumlah jiwa 86.600. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada strata 75 tahun keatas berjumlah 17.911 jiwa. Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

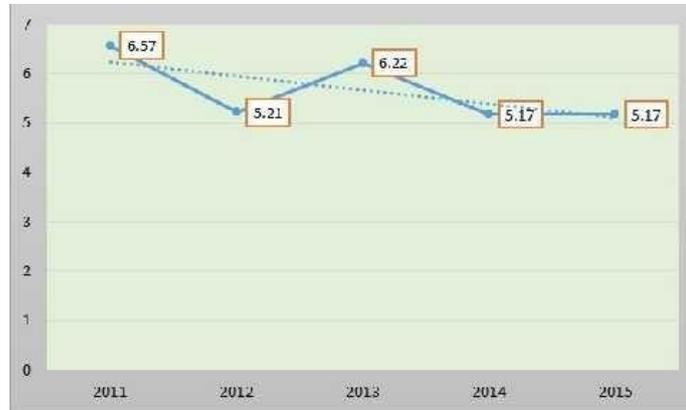
Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Kendal
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014



Sumber : Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2016

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat meskipun angkanya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yakni dari posisi negatif (-1,98%) pada tahun 2014 menjadi 0,26% pada tahun 2015.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2012-2015

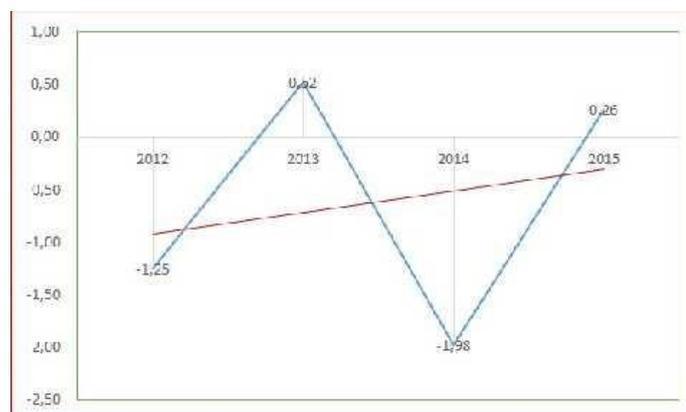


Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Dari data diatas maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tahun 2011 sampai tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal sejak tahun 2011 sampai 2015 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 angkanya sebesar 6,57%, pada tahun 2015 turun menjadi 5,17%.

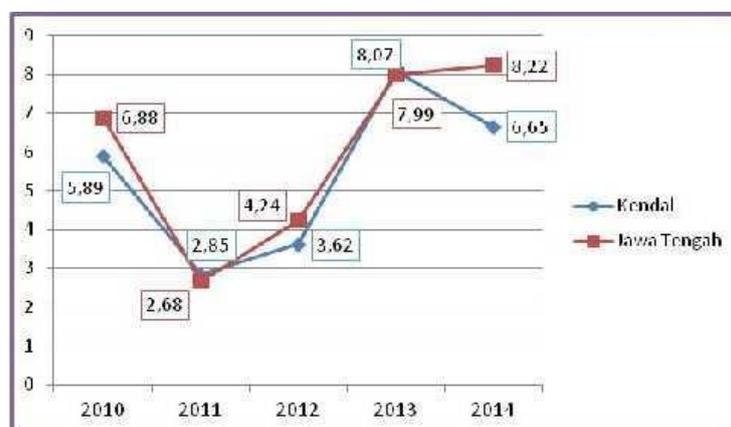
Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2015



Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

Laju inflasi Kabupaten Kendal menunjukkan tren meningkat dengan angka yang fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) rata-rata inflasi di Kabupaten Kendal sebesar 5,42%. Jika dibandingkan dengan inflasi di Jawa Tengah selama 5 tahun, angka inflasi di Kendal masih dibawah inflasi Jawa Tengah, kecuali pada tahun 2011 dan 2013. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini

Gambar 2.7
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah (%)
Tahun 2010 – 2014



Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal 2014

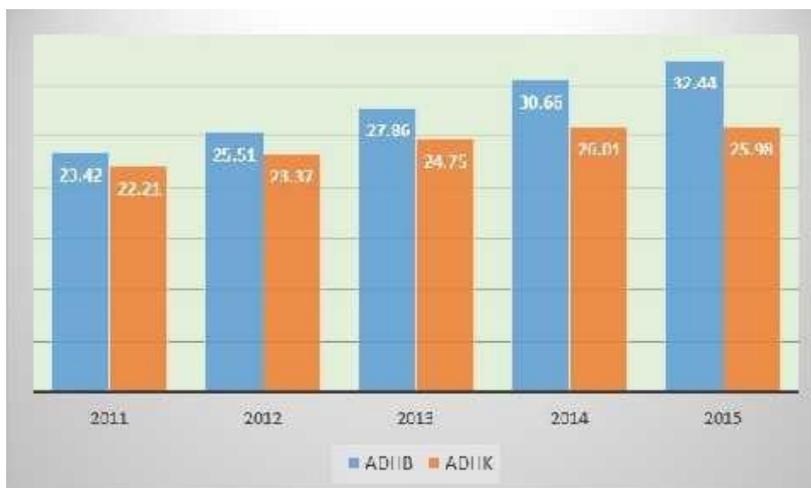
Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan Produk Domestik Bruto Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan perkapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat

kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan perkapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB perkapita.

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Kendal dalam kurun 2011-2015 naik dari Rp. 23,42 juta menjadi Rp. 32,44 juta.berdasarkan atas harga berlaku. Sedangkan berdasarkan harga konstan naik dari 22,21 juta rupiah menjadi 25,98 juta rupiah.

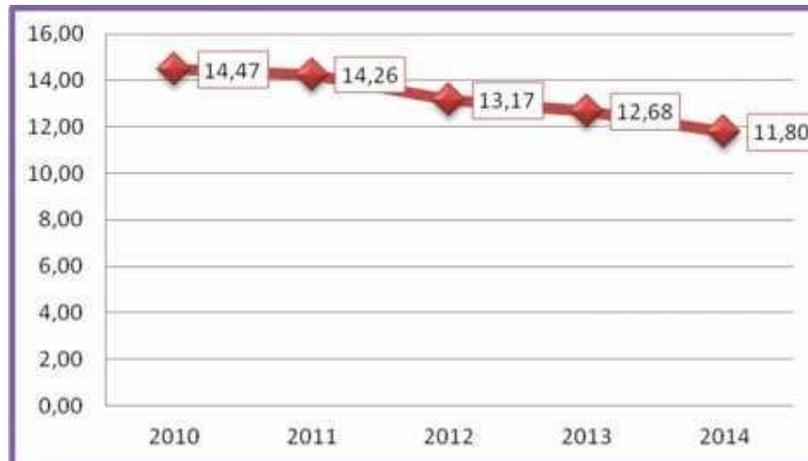
Gambar 2.8
PDRB perkapita Kabupaten Kendal Tahun 2011-2015 (juta)



Sumber : Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 14,47% pada tahun 2010 menjadi 11,80% pada tahun 2014. Jika diakumulasikan terjadi penurunan capaian sebesar 2,67%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9 dibawah ini.

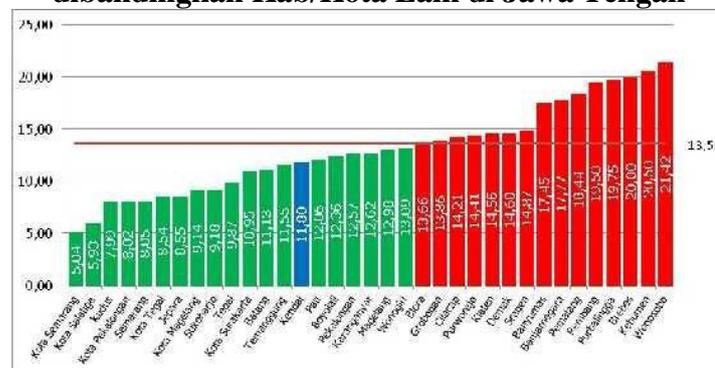
Gambar 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kendal Tahun 2011-2014



Sumber : TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 14 dari total 35 Kabupaten/kota yang ada. Capaian Kabupaten Kendal sudah dibawah rata-rata Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Kabupaten Kendal masih lebih tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan juga Temanggung.

Gambar 2.10
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2014
dibandingkan Kab/Kota Lain di Jawa Tengah

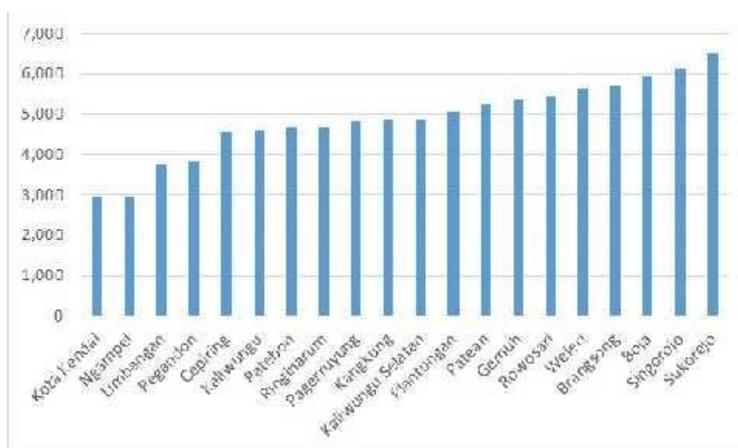


Sumber : TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, rumah tangga miskin menggunakan sumber basis data terpadu untuk program perlindungan sosial (2015) maka rumah tangga miskin pada desil 1 dan 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Penduduk miskin desil 3 paling banyak ada di Kecamatan Boja. Adapun untuk desil 4 ada di Kecamatan Kaliwungu. Sedangkan jika dilihat dari individu, paling banya pada desil 1 adalah Kecamatan Plantungan. Desil 2 paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Desil 3 paling banyak ada di Kecamatan Boja dan desil 4 paling banyak ada di Kecamatan

Jika dilihat dari posisi relatif, jumlah rumah tangga miskin dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kendal paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Kota Kendal.

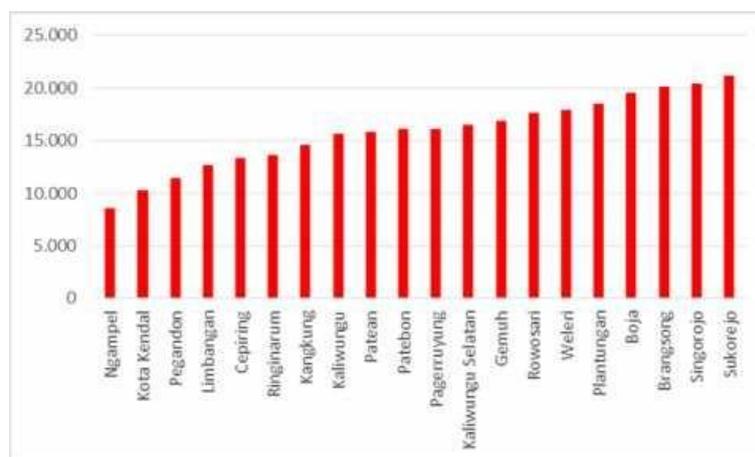
Gambar 2.11
Posisi Relatif Rumah Tangga Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kendal



Sumber : PBDT Tahun 2015

Jika dilihat dari sisi individu, penduduk miskin dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Kendal paling banyak ada di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Ngampel.

Gambar 2.12
Posisi Relatif Individu Miskin dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kendal



Sumber : PBDT Tahun 2015

2.1.5. Pemerintahan Kabupaten Kendal

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, dirumuskan 9 (sembilan) Misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih dan bebas KKN.

- b) Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
- c) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.
- d) Meningkatkan partisipasi dan keberadaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
- e) Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
- f) Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
- g) Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
- h) Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- i) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

2.1.5.1. Otonomi Kabupaten Kendal

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalitas aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah yang baik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website www.kendalkab.go.id yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta sistem informasi penunjang lainnya. Beberapa indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pemerintahan Umum

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam	buah	-	1	4	2	1

	satu tahun						
2	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan peraturan perundangan tentang penataan kelembagaan	unit	1	70	0	0	1
3	% SKDP yang bernilai IKM baik	Unit	20	6	1	1	1
		Unit	26	26	26	26	26
4	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	0	0	14	1	0
5	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Kendal komponen pelaporan kinerja	skor	6,5	6,74	8,69	8,1	8,15

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, 2016

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 Km² dan terbagi kedalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 sebesar 37,10% dalam kondisi baik dan sisanya 62,9% dalam kondisi rusak. Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke

tahun. Pada tahun 2011 penumpang angkutan umum sebanyak 3.433.256 orang, meningkat menjadi 4.742.465 orang pada tahun 2015.

Saat ini Kabupaten Kendal telah memiliki peraturan mengenai tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal. Tingkat Ketaatan terhadap perda RTRW juga cukup baik, tercatat sampai tahun 2015 hanya terdapat 4 kasus pengaduan terkait pelanggaran tata ruang dan semuanya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang. Luas kawasan industri di Kabupaten Kendal sesuai dengan apa yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.200 hektar. Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal terletak di Kecamatan Kaliwungu. Sejak tahun 2014 Kabupaten Kendal mulai mengembangkan kawasan industri terpadu yang terletak di Kecamatan Kaliwungu. Lahan yang direncanakan untuk pengembangan awal adalah 2.770 ha.

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 9 wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kenda, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 55.600,21 Ha. Selain banjir, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pegandon,

Brangsong, Gemuh, Cepiring. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang terkena bencana kekeringan adalah 99.972,78 Ha.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 pusat kegiatan. Pertama adalah pusat kegiatan nasional yang selanjutnya disebut sebagai PKN adalah kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang dan Purwodadi (Kedungsepur). Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja, Kaliwungu dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon. Jumlah restoran yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 70 buah dan ditahun 2015 meningkat mejadi 88 buah. Penginapan atau hotel yang ada di Kabupaten Kendal total berjumlah 25 buah. Sedangkan dilihat dari

kelasnya, 23 buah hotel tersebut merupakan hotel kelas melati dan 2 hotel bintang. Salah satu penyebab kurang berkembangnya perhotelan di Kabupaten Kendal adalah karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Kota Semarang. Banyak orang yang berkunjung ke Kabupaten Kendal lebih memilih untuk menginap di Kota Semarang karena fasilitasnya lebih lengkap.

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60%, kemudian pada tahun 2015 pencapaiannya sudah sampai pada angka 75%. Kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2012, namun dari 2013 sampai 2014 justru mengalami kenaikan. Tahun 2010 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 293 dan tahun 2015 sebanyak 150 kasus. Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal adalah pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Data terakhir menunjukkan kasus pencurian yang terjadi sebanyak 80 kasus, sedangkan penyalahgunaan narkoba sebanyak 31 kasus.

Pelayanan perijinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Jenis perijinan yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal meliputi Izin Prinsip, Izin Lokasi/Keterangan Lokasi, Izin Gangguan, Izin Mendirikan dan Merobohkan

Bangunan (IMMB), Izin Trayek, Izin Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDP), Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Kepariwisata/Pengelolaan Obyek Wisata, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Izin Usaha Toko Modern. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan bervariasi, mulai dari 3 hari sampai 14 hari. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

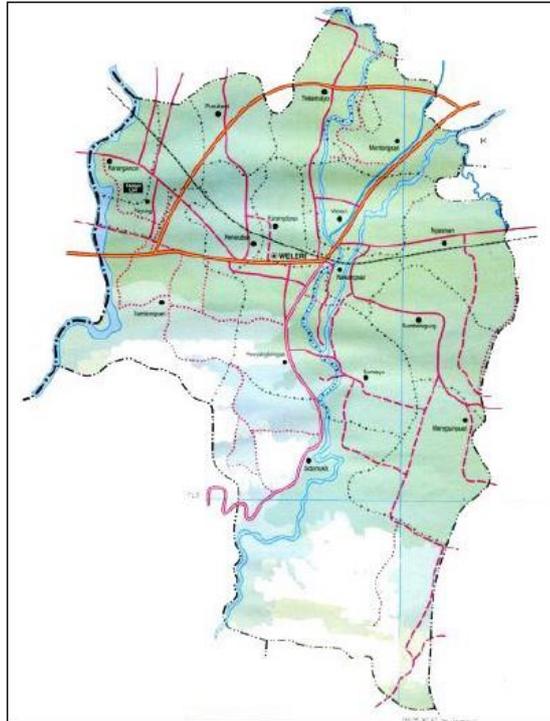
Tabel 2.5
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1	Izin Usaha Kepariwisata	12 hari
2	Izin Gangguan HO	14 hari
3	Izin Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum	3 hari
4	Izin Lokasi/Keterangan Lokasi	14 hari
5	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB)	14 hari
6	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14 hari
7	Izin Reklame	14 hari
8	Izin Trayek	14 hari
9	Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum	5 hari
10	Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum	5 hari
11	Persetujuan / Izin Prinsip	14 hari
12	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	12 hari
13	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
14	Tanda Daftar Gudang (TDG)	12 hari
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	7 hari
16	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	7 hari

Sumber : BPMPT Kabupaten Kendal 2015

2.1.5.2. Profil Pemerintah Kabupaten Kendal

Gambar 2.13
Gambar Peta Kabupaten Kendal



Sumber : <https://www.kendalkab.go.id>

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur, berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung. Topografi Kabupaten Kendal, terbagi dalam tiga jenis yaitu Daerah pegunungan yang terletak dibagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 mdpl. Suhu berkisar antara 250C. Kemudian daerah perbukitan berada disebelah tengah dan dataran rendah

serta pantai disebelah utara dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 10 mdpl dan suhu berkisar 270 C.

b. Luas

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untuk tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen, dalam lain-lain sebesar 46 persen.

c. Jarak dan Ketinggian

Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 679 m diatas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,26 m diatas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah diatas permukaan laut yaitu 4.870 m di atas permukaan laut.

d. Hari dan Curah Hujan

Selama tahun 2014 di lima wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari di Kecamatan Kota Kendal yaitu sekitar 1.109 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sekitar 0 mm untuk Kecamatan Kendal dan Boja. Jumlah curah hujan pada tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Untuk tahun 2014 berkisar 2.664 mm sedangkan untuk tahun 2013 berkisar 2.704 mm.

e. Sungai

Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2014 yaitu sungai Kali Kuto. Debit air Kali Kuto pada musim penghujan bisa mencapai 504,7 m³/dt, merupakan debit air tertinggi diantara 10 sungai lainnya di Kabupaten Kendal. Sedangkan pada musim kemarau, debit air terbesarpun ada di Kali Kuto berkisar 100,9 m³/dt dengan panjang sungai 52 km.

f. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata dan Berkeadilan Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT”. Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut ;

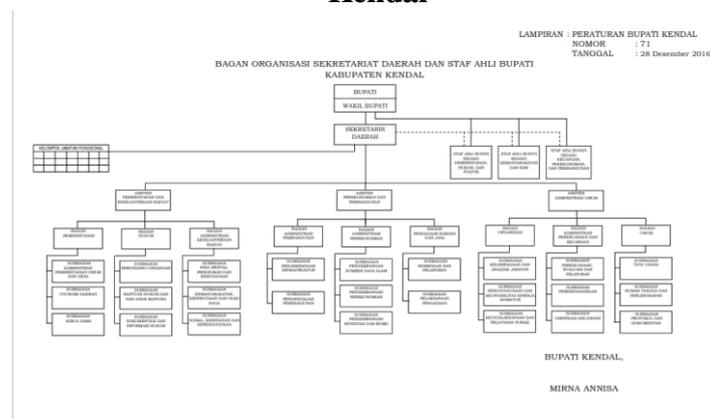
1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif-efisien, bersih dan bebas KKN.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.

4. Meningkatkan partisipasi dan keberadaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme.
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber alam lainnya.
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang, baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

g. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut ;

Gambar 2. 14
Bagan Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal



Sumber : Peraturan Bupati kendal Nomor 71 Tahun 2016

2.1.6. Profil Desa Purworejo

Gambar 2.15
Gambar Peta Desa Purworejo



Sumber : Google Maps Desa Purworejo

Desa Purworejo merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Rininarum yang terletak 5 km ke arah barat dari kota Kendal, Desa Purworejo mempunyai luas wilayah seluas 1.437.252 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Purworejo :

Tabel 2.6
Batas Desa Purworejo

Batas Desa	
Sebelah Utara	Desa Poncorejo
Sebelah Selatan	Desa Rowobranten
Sebelah Timur	Desa Mojo
Sebelah Barat	Desa Pagerdawung

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

Iklim Desa Purworejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum.

a. Visi Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Desa Purworejo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Purworejo seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Desa Purworejo adalah ;

“Terwujudnya Purworejo sebagai Desa yang mandiri berbasis Pertanian untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera”

b. Misi Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Purworejo, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Purworejo adalah ;

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industry, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tatakelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan masyarakat
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

c. Sejarah Desa

Adapun sampai saat ini, Desa Purworejo pernah dipimpin oleh 6 Kepala Desa yang pernah menjabat. Adapun nama-nama Kepala Desa Purworejo adalah sebagai berikut;

Tabel 2.7
Nama Kepala Desa Purworejo

No	Nama	Tahun Jabatan
1.	Sardjo	Tahun 1989 s/d 1999
2.	Kasdan Karto W.S	Tahun 1994 s/d 1999
3.	Badridin	Tahun 1999 s/d 2004
4.	Maskur	Tahun 2004 s/d 2009

5.	Muhammad Subir	Tahun 2009 s/d 2014
6.	Ali Muhtadi	Tahun 2014 s/d 2019

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

d. Pembagian Wilayah

Secara administratif pembagian wilayah Desa Purworejo adalah sebagai berikut ;

Desa : Purworejo

Nama Kepala Desa : Ali Muhtadi

Jumlah Dusun : 03

Jumlah RW : 05

Jumlah RT : 11

Tabel 2.8
Tabel Daftar Nama Perangkat Desa

Nama Kepala Dusun	Nama Ketua RW	Nama Ketua RT
Takiyat	Maftahu	Sodikin
Mangsur	Harsono	Munadirin
Suyono	Mulyono	Mujiyono
	Uswanto Taufiq	Kobro
	Ahmad	Muhadi
		Suratno
		Kunadi
		Saefudin
		Sugiarto
		Nurul awalin
		Muhadi
		Ahmad Soleh
		Suradi
		Ngasdi
		Sutio
		Kasmudi

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

e. Demografi Desa

Desa Purworejo terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 2.982 jiwa atau 888 KK, dengan perincian sebagai berikut ;

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Desa Purworejo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.388 Orang
2.	Perempuan	1.594 Orang
3.	Kepala Keluarga	888 KK

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah (Jiwa)
1	> 65	214
2.	60 – 65	90
3.	55 – 60	162
4.	50 – 55	184
5.	45 – 50	166
6.	40 – 45	159
7.	35 – 40	165
8.	30 – 35	170
9.	25 – 30	176
10.	20 – 25	195
11.	15 – 20	227
12.	10 – 15	237
13.	5 – 10	252
14.	< 5	264
Jumlah		2.982

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

f. Keadaan Sosial Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Purworejo adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.11
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	1
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	496
3	Tamat SD/ Sederajat	214
4	Tamat SLTP/ Sederajat	115
5	Tamat SLTA/Sederajat	210
6	Tamat D1, D2, D3	38
7	Sarjana / S-1 / S-2	5

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

Kesenian yang masih ada di masyarakat Desa Purworejo adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.12
Kesenian Masyarakat

No	Jenis Kesenian	Jumlah Kelompok	Status
1	Barongan	2	Aktif
2	Rebana	-	-

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

g. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Tabel 2.13
Mata Pencaharian Penduduk

Petani	Pedagang	PNS	Tukang/Jasa	Lain-Lain
200	-	32	10	-

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

Jumlah Kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Purworejo adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.14
Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-Lain
-	4	4	-	-

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

h. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.15
Jumlah Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana & Sarana	2014	2015	2016
1	Jalan beraspal	3 km	3km	2km
2	Jalan berbatu/tanah	1 km	1 km	1 km
3	Jembatan Kecil	-	-	-
4	Jembatan Sedang/Besar	-	-	-
5	Bendungan	-	-	-
6	Jaringan Irigasi	120 ha	120 ha	120 ha
7	dll	-	-	-

Sumber : <https://www.kecamatanringinarum.com>

2.1.7. Awal kemunculan Aliran Ahmadiyah di Indonesia

Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah bermula dari pada pemuda Indonesia yang menuntut ilmu di Pusat Gerakan Ahmadiyah di Qadian, India. Pada tahun 1922, para pemuda Indonesia pergi keluar negeri untuk menuntut ilmu agama Islam, kebanyakan melanjutkan perjalanannya ke Mesir, tempat perguruan tinggi Al-Azhar. Akan tetapi ada dua pemuda dari Sumatra pergi ke India. Kedua pemuda ini dianjurkan gurunya untuk pergi ke India karena sudah banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan pelajaran ke Mesir.

Mereka pergi ke Lahore karena mereka pernah mendengar nama Kwaja Kamaludin salah seorang pemimpin Ahmadiyah building yaitu pusat Gerakan Ahmadiyah Lahore. Mereka dididik oleh Abdus Sattar, namun tetap saja mereka tidak dapat kepuasan. Pada suatu ketika timbul keinginan mereka untuk berziarah ke makam Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh secretariat Ahmadiyah Lahore yang bernama Babu Manshur. Setelah tidak dibolehkan ke Qadian mereka mendesak gurunya yaitu Abdus Sattar untuk

diizinkan pergi ke Qadian dan Abdus Sattar mengatakan kepada mereka “kalau kalian berhasrat betul-betul ingin belajar, tinggalkan Lahore dan pergilah ke Qadian, sebab disanalah terdapat pusat Ahmadiyah.

Pada bulan Agustus 1923, berangkatlah mereka ke Qadian. Mereka menemui Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putera dari Mirza Ghulam Ahmad, yakni khalifah II, untuk belajar agama. Mereka diperbolehkan masuk di Madrasah Ahmadiyah. Setelah mereka beberapa lama tinggal di asrama dan belajar secara teratur, mereka mengirim surat kepada keluarga dan teman-teman di tanah air. Dan menceritakan sekolah tempat mereka belajar sehingga menarik minat teman-teman untuk datang ke Qadian. Maka berdatanglah pemuda-pemuda lainnya dari Indonesia ke Qadian untuk menuntut pelajaran ilmu agama, semuanya berjumlah 19 orang dan semuanya masuk sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah.

Pada bulan November 1924, para pemuda Indonesia mengundang Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad dalam jamuan the, beserta para tokoh Jemaat. Dalam jamuan itu, pihak pelajar membacakan pidatonya dalam bahasa Arab yang diwakili oleh Haji Mahmud. Inti dari pidato yang diucapkan oleh Haji Mahmud ialah menyampaikan permohonan atas nama seluruh pemuda Indonesia agar Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad berkenan untuk mengunjungi Indonesia. Atas permintan tersebut, maka Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad menunjuk Maulana Rahmat Ali sebagai mubaligh untuk Sumatra dan Jawa. Pada tanggal 15 Agustus 1925 diadakan acara pelepasan mujahid pertama untuk Indonesia, Maulana Rahmat Ali diberi nasihat-nasihat oleh Khalifah II sebelum berangkat ke Indonesia.

Pada tahun 1926, Maulana Rahmat Ali meninggalkan Tapaktuan menuju Padang. Setibanya di Padang, Maulana Rahmat Ali mulai melakukan tabligh seperti pada waktu ia tiba di Tapaktuan sehingga membuat resah warga Padang, bahkan sampai ke daerah-daerah seperti Padang Panjang, dan Bukittinggi. Mentera dari tabligh Maulana Rahmat Ali antara lain; adalah masalag Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang al-Mahdi yang dijanjikan Tuhan, al-masih, kematian Isa Ibnu Maryam dan terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang tidak membawa Syariat setelah Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat reaksi dan pertentangan yang dilakukan oleh warga padang kepada Maulana Rahmat Ali sampai didirikannya “Komite Mencari Hak” yang dipimpin oleh Tahar Sutan Marajo dengan tujuan untuk mempertemukan Maulana Rahmat Ali dengan ulama Minangkabau.

Setelah komite tersebut berdiri, komite tersebut mengundang Maulana Rahmat Ali dan para ulama Minangkabau untuk berdebat di pasar Gadang. Akan tetapi, penyelenggaraan debat tidak jadi dilaksanakan karena para ulama Minangkabau tidak datang kecuali murid-muridnya sehingga membuat para anggota komite merasa kecewa. Reaksi yang lain, pada tahun yang sama dari Dr. H. Abdul Karim Amrullah ayah dari Hamka, beliau mengecam keras paham Ahmadiyah yang dibawa oleh Maulana Rahmat Ali dan menganggap bahwa kaum Ahmadiyah berada di luar Islam bahkan lebih tegasnya lagi kafir.

Maulana Rahmat Ali pindah dari Sumatra ke Jawa untuk kepentingan misinya. Darerah pertama yang ditujunya adalah Batavia. Sesampainya di Batavia, ia tinggal di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga asal Padang di

daerah Bungur. Dengan usahanya yang tekun, keras dan sabar ia mendapatkan bantuan dari pengikutnya dari Padang yang bernama Abdul Ghani dan Abdul Djalil. Dengan waktu yang singkat, Maulana Rahmat Ali mampu menyebarkan paham Ahmadiyah di beberapa kota di wilayah Jawa Barat.

Mengenai paham yang disebarkan oleh Maulana Rahmat Ali, debat terjadi hingga dua kali. Debat pertama terjadi melalui bidang keagamaan di Bandung, pada tanggal 14, 15, dan 16 April selama tiga hari. Perdebatan ini diselenggarakan terbuka antara organisasi PERSIS dengan Ahmadiyah Qadian, wakil dari pihak Ahmadiyah Qadian adalah Maulana Rahmat Ali, Maulana Abu Bakar Ayyub. Sedangkan dari PERSIS diwakili oleh A. Hassan dengan pimpinan Mohammad Syafi'I dari PSII, perdebatan ini terjadi di Bandung dan dihadiri oleh utusan-utusan dari organisasi-organisasi Islam dan kalangan pers.

Perdebatan kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28, 29 dan 30 September 1933, bertempat di Gedung Permufakatan Nasional, Jakarta. Dengan mengambil tema Hidup Matinya Nabi Isa As, Masalah Kenabian, dan Dakwah Mirza Ghulam Ahmad. Perwakilan dari Ahmadiyah Qadian adalah Maulana Rahmat Ali, Maulana Abu Bakar Ayyub. Sedangkan dari pihak PERSIS adalah A. Hassan dkk. Meskipun terjadi debat dua kali dan tidak ada penyelesaian dalil, mereka tetap pada pendirian masing-masing dan debat ini berakhir dengan mubalahah.

Nama resmi organisasi ini adalah Anjuman Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia (AAQDI). Susunan pengurus besarnya masih sangat sederhana pada

tahun 1935-1952, disamping statusnya belum diakui sebagai badan hukum yang disahkan oleh pemerintah dan pada tahun-tahun itu organisasi Anjuman Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia mengalami banyak hal. Setelah tahun 1949 nama organisasi ini berubah menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) setelah menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada muktamar pertama tanggal 11 Desember 1949.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia lebih dipertegas dengan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 0628/Ket/1978 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No. 04.

Sesuatu yang menarik dari gagasan Ahmadiyah ialah tentang wahyu. Secara epistemology, konsep wahyu yang diyakini Ahmadiyah mengambil dari Al-Quran dari beberapa surat yang dipahami sebagai ajaran utama. Pada tahun 1876, Ghulam Ahmad mengaku bermimpi kedatangan malaikat dan menasihatinya agar menjalankan ibadah puasa sesuai dengan sunah para rasul sebagai usaha menerima rahmat Tuhan. Dan Ghulam Ahmad menjalankan puasa delapan bulan lamanya. Pada wilayah berbeda, berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas dari sosio-agama dan politik, yaitu persinggungan Ghulam Ahmad dengan agama-agama, persinggungan tersebut menimbulkan konflik dengan kaum misionaris dan pada waktu yang sama, Ghulam Ahmad juga tertarik dengan pergerakan kaum Hindu Arya Samaj, sehingga memantapkan Ghulam Ahmad untuk menyebarkan ideologinya dengan menulis beberapa artikel keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin non muslim.

Ghulam Ahmad menerima wahyu pertama pada tahun 1881. Namun Ghulam Ahmad tidak menyatakan langsung kepada khalayak karena kondisi sosial yang belum memungkinkan, seperti perpecahan umat Islam dan kepercayaan yang kuat. Kemudian, pada Desember 1888 Ghulam Ahmad menyatakan secara terang-terangan dan mengumumkan bahwa dirinya telah mendapat wahyu ilahi untuk menerima baiat dari para pengikutnya. Perintah Tuhan pada wahyu tersebut menuntuk Ghulam Ahmad untuk melakukan dua hal. Pertama, menerima baiat dari para pengikutnya. Kedua, membuat bahtera yaitu membuat wadah untuk menghimpun suatu kekuatan yang dapat mensukseskan misi dan cita-cita kesuciannya guna menyerukan Islam ke seluruh dunia.

Hal menarik selain masalah wahyu ialah masalah paham al-Masih al-Mahdi dari Ghulam Ahmad atau biasa disebut Masih Mau'ud. Dalam hal ini, Ahmadiyah berfikir rasionalis-liberal dalam memahami Imam Mahdi dan Nabi Isa. Meskipun estimologi pemahamannya mengambil dari Al-Quran dan Hadis, tetapi yang dihasilkan berbeda dengan mayoritas umat Islam.

Ghulam Ahmad mengungkapkan bahwa Isa As telah meninggal sebagaimana manusia secara keseluruhan dan dikubur di Srinagar, Kashmir. Dalam pandangan Ahmadiyah, al-Masih yang janjikan kedatangannya bukan pribadi Nabi Isa Asyang di utus kepada Bani Israil, tetapi salah satu dari umat Nabi Muhammad yang mempunyai perangai dan sifat seperti Nabi Isa. Oleh karena itu, tokoh tersebut juga disebut al-Mahdi. Dengan demikian dalam teologi Ahmadiyah bahwa al-Masih dan al-Mahdi adalah satu pribadi. Lebih lanjut, Ahmadiyah meyakini bahwa kedatangan Imam Mahdi tidak dapat dipisahkan dengan

kedatangan al-Masih di akhir zaman dan kedatangannya telah dijanjikan oleh Tuhan.

Kehadiran Ghulam Ahmad yang mengaku mendapat wahyu dan menjadi juru penyelamat sehingga mewakili kenabian tidak lepas dari konteks sosial-keagamaan masyarakat India, yaitu miskin, rakus, dan berperilaku negative. Sehingga status al-Masih yang disandangkan pada Ghulam Ahmad bertujuan untuk menghilangkan sikap primitive dan Nabi Isa muncul yang digambarkan akan membunuh babi yang mempunyai makna menghilangkan tabiat kotor manusia, karena babi termasuk hewan kotor dan serakah.

Secara sosial agama, Ahmadiyah adalah bagian dari gerakan dengan paham Mahdiistik yaitu paham yang meyakini bahwa Mahdi dipandang sebagai “Hakim peng-*islah*” juru damai. Selain itu Mahdi mempunyai visi menyatukan kembali seluruh agama, terutama Nasrani dan Hindu agar melebur kedalam Islam. Pengakuan Ghulam Ahmad sebagai nabi tidak hanya untuk umat Islam dan Kristen, tetapi untuk semua keyakinan yang ada pada masanya, seperti Zoroaster dan Khrisna bagi kaum Hindu. Dengan demikian, menyikapi kemunculan Ahmadiyah adalah sesuatu yang urgen untuk melihat konstruksi pemikiran.

Masalah kenabian di tubuh Ahmadiyah adalah masalah kompleks. Golongan Ahmadiyah Lahore dan Qadian juga mempunyai persepsi yang berbeda dengan memahami kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Secara garis besar, kedua kelompok tidak berselisih pemahaman bahwa Nabi Muhammad adalah nabi tasyri’I atau nabi *mustaqil* yang terakhir. Persamaan pendapat diatas tidak lantas menyelesaikan

pemahaman terhadap status kenabian Ghulam Ahmad. Menurut Ahmadiyah Lahore, Ghulam Ahmad dipandang sebagai pembaharu (*muhaddast*). Hal ini berangkat dari ungkapan Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai pembaharu, adapun ungkapan sebagai nabi hanya bersifat mujazi dari status pembaharuannya.

Tetapi bagi kelompok Qadian, Ghulam Ahmad dianggap sebagai Nabi *Zhili ghair tasyri'I*, yaitu nabi yang diutus oleh Allah karena kepatuhan dari nabi sebelumnya dan nabi ini tidak membawa syariat karena bertujuan untuk memperjelas ajaran agama. Adapun hasil *zhilli* tersebut muncul dari mat nabi sebelumnya.

Kelompok Qadian membagi konsep kenabian pada tiga garis besar. Pertama, nabi *shahih al Syar'i* dan *mustaqil* ialah nabi yang membawa syariat Allah yang diutus pada umatnya, namun berbeda dengan *mustaqil* yang tidak membawa syariat dan tidak mengikuti nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa. Kedua, nabi *mustaqil ghair tasyri'I* ialah nabi yang tidak mengikuti nabi sebelumnya dan juga tidak membawa syariat baru, tetapi mempunyai tugas untuk melestarikan syariat nabi sebelumnya, seperti Nabi Zakariya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketiga, Nabi *zhilli ghair tasyri'I* ialah seorang yang mendapat anugrah untuk melestarikan syariat dari nabi sebelumnya dan bagian dari umatnya dan yang diangkat ialah Mirza Ghulam Ahmad.

Dalam pandangan Ahmadiyah, terpilihnya Ghulam Ahmad sebagai nabi bayangan disebabkan pilihan Tuhan karena merupakan orang yang saleh. Pada sisi lain, Ghulam Ahmad berusaha dalam menghidupkan ajaran agama sebagai

perlawanan atas misionaris dan umat Hindu tidak lantas mendapat dukungan dari kalangan muslim. Hal ini didasarkan bahwa ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran mayoritas umat Islam. Ajaran Ghulam Ahmad tentang kenabian menjadi auto-kritik bagi umat Islam, yaitu bahwa secara doctrinal agama mengajarkan kebebasan, perjuangan dan semua hal yang bersifat positif.

2.1.8. Profil Jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah adalah sebuah organisasi dalam Islam yang bersifat global, didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 M, bertepatan dengan tahun 1306 H. Jemaat Ahmadiyah dulu berpusat di Qadian, India. Namun setelah tahun 1947, karena Negara India pecah menjadi dua yaitu India dan Pakistan, maka pusat Jemaat Ahmadiyah berpindah dari Qadian, India ke Rabwah, Pakistan hingga sekarang. Menurut Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Sang Pendiri Jemaat Ahmadiyah didirikan atas perintah Ilahi dengan tujuan *Yuhyiddina wa yuqiimusy-syari'ah* – menghidupkan kembali agama dan menegakkan syari'at islam dan *Liyudhirahu 'alad-diini kullihi* – memenangkan Islam diatas semua agama. Untuk mencapai itu, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mengajak setiap orang mencintai Islam dan merindukan kebangkitan islam kembali untuk kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Untuk bergabung ke jemaatnya, bersama-sama mengadakan pembaharuan keimanan mengakui Allah dan Rasul-Nya Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, dengan cara menyatakan ikrar bai'at mengucapkan Dua Kalimah Syahadat dan berjanji dengan hati yang jujur, bahwa ;

1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimna juga dorongan terhadapnya
3. Akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya (*Muhammad Shalallahu 'alaihi wa sallam*) dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan shalat tahajjud dan mengirim shalawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah Muhammad *Shallaahu 'alaihi wa sallam* dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, selalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apapun juga.
5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang dalam duka maupun suka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan

memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah bahkan akan terus melangkah ke muka.

6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Quran Suci atas dirinya. Firman Allah dan Sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur dan sombong , akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti halus dan sopan santun
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya dan anak-anaknya dan dari segala yang dicintainya
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini “Imam Mahdi dan al Masih Mau'ud”, semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf (segala yang baik) dan akan berdiri diatas perjanjian ini hingga mautnya dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan, ataupun ikatan kerja.¹

Nama Ahmadiyah diberikan bukan karena Sang Pendiri bernama Ahmad. Nama Ahmadiyah diambil dari nama lain Nabi Muhammad SAW, yaitu : Ahmad dengan motivasi, dalam mewujudkan upaya missinya, Jemaat Ahmadiyah hanya akan menempuh cara-cara santun dan damai dengan menampilkan keindahan dan

¹ Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jateng. 2011. *Ahmadiyah yang Kami Pahami dan Kami Ikuti*. Dewan Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Semarang.

ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW. Ahmad adalah nama sifat yang menampilkan sifat *jamal* – cantik atau indah. Dengan latar nama ini, maka Jemaat Ahmadiyah mempunyai motto : *Islam = Peace. Ahmadiyah = Love for All Hatred for None*².

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jemaat Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, yang dulu berpusat di Qadian India dan sekarang di Rabwah Pakistan. Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri tahun 1925, 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jemaat Ahmadiyah Indonesia pertama kali bersemi di Tapak Tuan, Aceh, kemudian melebar ke Padang Sumatera Barat, Kemudian ke Batavia (Jakarta Sekarang) dan kemudian ke seluruh daratan Jawa dan akhirnya tersebar diseluruh wilayah NKRI. Kini, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memiliki lebi 350 Cabang di 33 Provinsi diseluruh wilayah Indonesia dan berkantor pusat di Kemang, Parung, Bogor Jawa Barat.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri dengan motivasi untuk mendukung misi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yaitu *Yuhayiddiina wa yuqiimusy-syari'ah* – menghidupkan kembali agama dan menegakkan syari'at islam dan *Liyudhirahu 'alad-diini kullihi* – memenangkan Islam diatas semua agama. Untuk tujuan itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersedia mengadakan pembaharuan keimanan mengakui Allah dan Rasul-Nya Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, dengan cara menyatakan ikrar bai'at mengucapkan Dua Kalimah Syahadat dan berjanji dengan hati yang jujur akan melaksanakan sepuluh syarat bai'at masuk kedalam

² Ibid halaman 3

Jemaat Ahmadiyah, seperti yang ditetapkan oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Pendiri Jemaat Ahmadiyah. Walaupun Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah ada dan berdiri lebih awal dari Republik Indonesia, namun dalam perjalanan sejarahnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak mulus seperti yang dibayangkan. Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi legal formal berbadan hukum dengan SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13Tgl.13-3-1953.

Tahun 1980, Jemaat Ahmadiyah Indonesia dinyatakan berada diluar Islam, sesaat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³ Tahun 1984, Jemaat Ahmadiyah Indonesia direkomendasikan sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan, dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara oleh MUI⁴. Tahun 2005, Jemaat Ahmadiyah Indonesia kembali dinyatakan berada diluar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam) oleh MUI⁵. Tahun 2008, Jemaat Ahmadiyah Indonesia diberi peringatan dan diperintahkan, sepanjang mengaku agama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW, oleh Pemerintah Republik Indonesia. Larangan dan perintah tersebut dituangkan dalam Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 3 Tahun 2008 yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri.

³ Fatwa MUI Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadiyan. Lihat : <http://www.mui.or.id>

⁴ Rekomendasi MUI pada Rakernas MUI 1984, tentang : Jemaah Ahmadiyah. Lihat : <http://www.mui.or.id>.

⁵ Fatwa MUI Hasil Munas MUI 2005, tentang : Aliran Ahmadiyah. Lihat : <http://www.mui.or.id>

Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri tentu merupakan kendala berat yang dihadapi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam upaya mengembangkan sayap-sayap dakwahnya. Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri, membuat banyak orang menjadi alergi mendengar nama Ahmadiyah. Penjelasan apapun yang disampaikan Jemaat Ahmadiyah hampir dapat dipastikan tidak ada yang mau mendengarnya. Tetapi, fatwa MUI ataupun SKB Tiga Menteri tertib latarnya adalah salah mengerti akibat salah informasi. MUI menerbitkan fatwa dasarnya adalah Sembilan buah buku “tentang” Ahmadiyah yang bukunya hingga hari ini tidak diketahui nama dan judulnya. Pemerintah RI menerbitkan SKB Tiga Menteri dasarnya adalah Fatwa dan rekomendasi MUI serta desakan sekelompok umat Islam intoleran radikal. Sangat wajar jika Pemerintah RI salah mnengerti akibat salah informasi.

Sejak 2005, Jemaat Ahmadiyah Indonesia memang ada dua versi. Ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah dan ada Ahmadiyah versi MUI. Ahmadiyah versi MUI seperti seringkali di propandakan oleh KH. Ma’ruf Amin dan KH Amidhan, mengatakan: Ahmadiyah tidak meyakini Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wa sallam*, sebagai Khaataman-Nabiyyin (Nabi Terakhir), Ahmadiyah telah mengakui adanya lagi nabi baru yang ke-26 dan Ahmadiyah memiliki kitab suci baru bernama Tadzkirah. Dalam pandangan Ahmadiyah versi MUI itu, memang sesat dan menyesatkan. Wajar jika Pemerintah RI menerbitkan SKB dan melarang Ahmadiyah versi MUI menyebarkan faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sayangnya SKB itu ditujukan kepada Ahmadiyah versi Ahmadiyah dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia,

bukan kepada Ahmadiyah versi MUI yang dipropagandakan KH. Ma'ruf Amin dan KH. Amidhan.

Samanya keyakinan Jemaat Ahmadiyah dengan umat Islam lain umumnya berkaitan dengan kedudukan Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, sebagai *Khaataman-Nabiyyin*, arti *Khaataman-Nabiyyin* sebagai penutup segala nabi dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya baik nabi lama maupun nabi baru, Al-Qur'an sebagai Kitab Suci paripurna dan sebagai sumber pokok ajaran dan samanya kepercayaan Ahmadiyah berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi-Al-Masih al-Mauud. Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* dengan Wahabi, dengan NU, dengan Muhammadiyah, menunjukkan keyakinan yang dianut Jemaat Ahmadiyah tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Selisihnya barangkali, Ahmadiyah selama ini konsen mengkaji bab kedatangan Imam Mahdi-Al-Masih al-Mauud-Al-Masih Yang Dijanjikan Kedatangannya oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, sementara yang lain : Wahabi, Sunni, Syi'ah, NU, dan Muhammadiyah tidak. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika Jemaat Ahmadiyah lebih dulu mengetahui Imam Mahdi-Al-Masih al-Mauud – Al-Masih Yang Dijanjikan Kedatangannya oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*, telah datang dan telah menerimanya sementara yang lain belum mengetahui dan belum menerimanya. Akhirnya, kepada Allah jualah kembali segala urusan, dan hanya Allah jualah yang berada dalam hidayah-Nya.

2.1.9. Latar Belakang Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan sebuah gerakan aliansi perjuangan penegakan Syariat Islam yang menolak sekularisme, liberalisme, dan menghendaki berubahnya konstitusi hukum negara Indonesia menjadi hukum yang sesuai dengan Syariat Islam. Dengan membangun pola gerakan, Majelis Mujahidin Indonesia secara tegas tidak mau berkompromi dengan pihak yang tidak setuju dengan tegaknya Syariat Islam, bahkan kalangan *non-muslim*, muslim liberal termasuk juga kaum sekuler yang tidak dapat diterima sebagai pemimpin dan harus pula diperangi. Hal yang demikian itu didasarkan dengan cita-cita Majelis Mujahidin Indonesia yang berusaha menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, yakni didalam negara.

Majelis Mujahidin Indonesia dibentuk di Yogyakarta pada tahun 2000 dari hasil Kongres Mujahidin I. Lahirnya Majelis Mujahidin Indonesia didasari oleh keterpurukan umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu tidak diberlakukannya syariat Islam sebagai aliansi umat Islam demi penegakkan syariat Islam di Indonesia. Didirikannya Majelis Mujahidin Indonesia adalah untuk menghimpun segenap potensi dan kekuatan para mujahidin (umat Islam) dengan tujuan memberlakukan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan sebagai rujukan bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan. Abu Bakar Ba'asyir menjadi salah satu orang yang membidani lahirnya Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia adalah organisasi yang lahir dari Keputusan Kongres Mujahidin I pada tanggal 7 Agustus 2000.

Kongres Mujahidin I bukanlah hajat dari kelompok tertentu untuk menyaingi kelompok Islam yang lain. Lahirnya majelis Mujahidin adalah sebagai upaya peleburan kekuatan umat Islam dari berbagai latar belakang organisasi yang memiliki satu misi bersama, yaitu menegakkan syariat Islam. Setelah dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 15 Agustus 2000, perutusan dari Majelis Mujahidin Indonesia mengunjungi DPR RI. Di depan Fraksi Golkar, PPP, dan Partai Bulan Bintang disampaikan Piagam Yogyakarta dan pokok-pokok rekomendasi keputusan Kongres Mujahidin. Adapun isi dari materi tersebut, yaitu :

1. Sesungguhnya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat merupakan dambaan kita bersama.
2. Berkembangnya potensi disintegrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhir-akhir ini semakin akut menunjukkan bahwa tesis yang mengatakan bahwa “bila Syariah Islam diterapkan bagi pemeluk-pemeluknya maka akan terjadi disintegrasi” adalah salah dan tidak berdasar.
3. Justru karena Syari’ah Islam yang merupakan fitrah bagi umat manusia pada umumnya tidak diterapkan, maka potensi disintegrasi bangsa pun berkembang, bersama dengan bermunculannya berbagai bencana dibidang politik, keuangan dan moneter, HAM dan demokrasi dan sebagainya.
4. Oleh karena itu memberlakukan Syariah Islam bagi umat Islam dan memberlakukan ketentuan agama lain (Kristen, Katholik, Hindu, Budha)

kepada para pemeluknya merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa.

5. Merupakan hak asasi setiap pemeluk agama untuk menerapkan ajaran (syari'ah) agamanya masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini harus dipenuhi oleh negara karena dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29.
6. Syariah Islam mengandung nilai-nilai universal yang juga dikenal penganut agama lain, sehingga bila diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, syariah Islam mampu melindungi seluruh warga negara apa pun agamanya.
7. Siapa saja diantara umat Islam yang menolak Syariah Islam, maka sesungguhnya mereka tergolong manafik dan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta condong kepada kehidupan yang penuh konflik sebagaimana selama ini telah terjadi di Ambon, Maluku, Aceh, Poso dan lain sebagainya.

Majelis Mujahidin Indonesia adalah gerakan yang memiliki visi yaitu, *Tahtbiqus Syariat* (tegaknya Syariat Islam) secara *kaffah* dalam kehidupan umat Islam. Majelis Mujahidin memahami Islam sebagai pemahamannya para generasi islam terdahulu dimana islam sebagai teologi ketauhidan. Teologi ketauhidan menghendaki pemurnian ibadah atau ketundukan hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Teologi ketauhidan inilah yang mendasari sikap Majelis Mujahidin Indonesia untuk berjihad memerangi para *thaghut* (setan-setan yang disembah selain Allah) yang saat ini banyak disembah oleh umat manusia.

Visi, misi dan ambisi tersebut dibuktikan oleh MMI melalui berbagai programnya. MMI terhitung kerap menggelar forum-forum publik untuk konsolidasi syariat Islam. Bahkan MMI telah menerbitkan draft usulan UUD dan hukum pidana yang disesuaikan dengan syariat Islam. Draft usulan tersebut mereka kirimkan ke berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia. Bahkan mereka juga kirimkan draf itu kepada sejumlah tokoh dunia termasuk kepada Megawat, George W. Bush dan Saddam Hussein sebagai seruan untuk menerapkan sistem Islam.

Majelis Mujahidin sendiri termasuk dalam organisasi yang lahir dalam abad modern. Selayaknya sebuah organisasi yang lahir pada abad modern merespon pemikiran-pemikiran modernistas yang masuk ke dalam tubuh umat Islam. Majelis Mujahidin melihat dengan dilatarbelakangi kesadaran sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada Syariat Islam, maka harus menyamakan persepsi dan penyatuan langkah bersama. Majelis Mujahidin Indonesia berfungsi sebagai pemersatu dalam memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Pendiannya di Ilhami dari kondisi umat Islam yang memprihatinkan karena tidak diterapkan syariat Islam. Bahkan, menurut Majelis Mujahidin dampak tidak diterapkannya syariat Islam dirasakan oleh umat lain, yaitu kerusakan moral dan kehidupan sosial.

Majelis Mujahidin merupakan sebuah organisasi yang memiliki relasi ideologis dengan organisasi-organisasi terdahulu yang memperjuangkan syariat Islam. Meskipun demikian, organisasi tersebut bukan merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi sebelumnya. Majelis Mujahidin merupakan lembaga aliansi

bagi umat Islam untuk berjuang menegakkan syari'at Islam. Aliansi tersebut terbagi dalam tiga bentuk, yaitu (1) *Tansiqul Fardi*, sebagai wadah bagi individu-individu muslim; (2) *Tansiqul Amali*, sebagai wadah menyatukan program untuk tegaknya syariat Islam; (3) *Tansiqul Nidzami*, sebagai wadah mempersatukan organisasi-organisasi dengan tujuan bersama penegakan syariat Islam.

Untuk melancarkan cita-citanya, Majelis Mujahidin juga melakukan metode dalam berdakwah, yakni menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pertama, pendekatan struktural yakni pendekatan yang dilakukan Majelis Mujahidin dengan berdakwah atau berdialog dengan organisasi Islam maupun *non-Islam*, dari skala regional, nasional, bahkan hingga skala internasional sekalipun. Dialog ini bertujuan untuk membuka pikiran kaum yang tidak setuju atau bahkan tegaknya Syariat Islam. Dakwah atau dialog yang ada dalam metode pendekatan struktural ini memiliki warna berbeda, yakni membentuk konsolidasi kepada organisasi lain, atau partai politik untuk menyetujui dengan diberlakukannya syariat Islam di Indonesia, maka apabila hal ini terjadi, maka otomatis Majelis Mujahidin memiliki kekuatan lebih untuk menegakkan syariat Islam. Kedua, pendekatan kultural bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat secara umum dan menyeluruh tanpa pandang strata sosial didalam masyarakat. Bentuk dari pendekatan ini adalah dakwah kepada masyarakat, yakni seperti dakwah di kampung-kampung, tabligh akbar, maupun ceramah-ceramah yang diisi oleh amir atau anggota dari Majelis Mujahidin.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan yang demikian itu diterjemahkan kedalam berbagai kegiatan tergantung dari peristiwa yang sedang terjadi, baik itu merupakan bentuk dari isu-isu sosial politik, ekonomi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disaat ini. Dan perlu diingat bahwa kegiatan yang sedemikian itu merupakan mata-mata untuk mengarahkan masyarakat kepada jalan yang diridhai Allah dan untuk mensosialisasikan penegakan Syariat Islam.

Majelis Mujahidin berkembang hingga memiliki Lajnah Perwakilan Wilayah dan Daerah (LPW/LPD) hampir sebagian provinsi dan kota besar di Indonesia. Selain itu, Majelis Mujahidin juga memiliki unit *resuce*, yaitu Korp. Relawan Mujahidin dan Laskar Mujahidin yang berfungsi sebagai pengawal dalam memperjuangkan syariat Islam. Majelis Mujahidin juga memiliki sarana bagi menunjang aktivitasnya, yaitu Masjid Al-Rasul.

Sebagai organisasi yang lahir pada era modern, sepatutnya dia dapat merespon hal-hal yang berkenaan dengan modernitas. Majelis Mujahidin memiliki Pandangan seputar pemikiran-pemikiran modern, seperti HAM, sekularisme, dan demokrasi. Pandangan-pandangan ini agar dapat digunakan sebagai ‘pertahanan’ masyarakat dari serangan ide-ide yang dekonstruktif terhadap penerapan syariat Islam.

Jika dihubungkan dengan negara, Majelis Mujahidin Indonesia menghendaki bahwa Indonesia menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan Syariat Islam, bisa

saja ini didasari dengan simbol Indonesia yang notaben penduduknya sebagai muslim mayoritas.

Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia seakan menjadi fenomena yang dinamik dan menarik. Banyak pihak yang menuduh beberapa aktivisnya terlibat dalam kegiatan *Violence Actions* (aksi kekerasan) yang mengatasnamakan agama, bahkan dituduh mempunyai hubungan garis koordinasi dengan jaringan pelaku bom di sejumlah wilayah Indonesia yang populer disebut sebagai organisasi Al-Jamiah Al-Islamiah (JI), jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Menyikapi fenomena gerakan MMI yang dianggap sebagai kelompok radikal ini, terdapat kekhawatiran yang tidak hanya berasal dari *non-muslim*, tetapi juga dari kalangan muslim sendiri, terutama muslim yang liberal dan akomodasionis, mereka khawatir akan kekerasan yang potensial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim radikal yang efeknya dapat mempengaruhi terhadap citra Islam dimata dunia.

Majelis ini juga bisa dikatakan Islam politik, karena berada pada sebuah negara dan ingin mengubah tatanan yang ada pada suatu negara dimana ia bernaung dengan sistem yang mereka anut. Mereka berjuang dengan ideologi, pemikiran, aksi dan media lain yang bisa mewujudkan cita-citanya, bahkan sampai dengan menggunakan cara kekerasan. Jika dihubungkan dengan negara, Majelis Mujahidin menghendaki bahwa Indonesia menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan Syariat Islam, bisa saja merupakan agenda yang sangat diunggulkan, karena dengan bertambahnya anggota yang semakin banyak, maka hal ini dapat menguatkan pondasi keorganisasian akan semakin banyak, maka hal

ini dapat menguatkan pondasi keorganisasian akan semakin kuat. Oleh karena itu, perjuangan menuju Indonesia bersyariah juga akan semakin dekat dengan Majelis Mujahidin.

MMI mengklaim bahwa perlawanan terhadap penegakan syariat Islam tidak sama dengan melawan konstitusi negara. Penegakan syariat Islam bagi MMI, merupakan suatu bentuk manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis yang dibangun adalah dengan melibatkan sila pertama Pancasila bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan legitimasi konstitusi untuk menerapkan syariat Islam sebagai instrument persatuan. Upaya penegakan syariat Islam sendiri tegas dinyatakan merupakan kegelisahan MMI dalam merespon realita yang terjadi. Umat Islam masa kini, bagi MMI telah terpasung dalam kebodohan dan kejumudan sehingga yang terjadi dalam proses dinamisasi adalah umat Islam justru jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan organisasi yang terhitung masih muda. Ia didirikan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta sebagai hasil dari pertemuan sejumlah aktivis Muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa delegasi dari luar negeri pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2000 silam. Pertemuan itu disebut Kongres Mujahidin. Adapun tokoh kunci pada kongres tersebut adalah Irfan S. Awwas dan Abu Bakar Ba'asyir yang pernah dituduh sebagai pimpinan spiritual Jemaah Islamiyah, jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara.

Dalam kongres tersebut, selain merumuskan jajaran kepengurusan, komitmen-komitmen, arah gerak dan pandangan organisasi juga dibahas dan disepakati. Salah satu hasil kongres yang sangat fenomenal adalah lahirnya “Piagam Yogyakarta”. Berikut isi dari piagam tersebut:

1. Wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Menolak segala ideology yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifaq* serta melanggar hak asasi manusia.
3. Membangun satu kesatuan, *saf mujahidin* yang kokoh, naik di dalam negeri, regional maupun internasional (antar-bangsa),
4. Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya *imamah* (kepemimpinan) umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia.
5. Menyeru kepada kaum Muslim untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmah li al-alamin*.

Inti dari piagam tersebut adalah bagaimana syariat Islam di Indonesia dapat ditegakkan seutuhnya, baik secara moral maupun formal. Bagi MMI, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, umat Islam memiliki hak dan berkewajiban untuk mengamalkan syariat Islam sebagai konsekuensi dari komitmen teologis yang mereka pegang dan yakini. Ada tiga alasan mengapa MMI didirikan. Pertama, belum berlakunya syariat Islam secara formal khususnya di Indonesia, dan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim umumnya. Kedua, umat Islam dewasa ini belum memiliki tata kepemimpinan umat yang

berfungsi secara efektif dan berkemampuan untuk mengantar serta memberdayakan mereka pada tingkat kehidupan yang beradab dan bermartabat sebagaimana arahan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya. Ketiga, umat Islam saat ini masih terpasung dalam kebodohan, kejumudan, keterbelakangan dan kemiskinan padahal memiliki Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup mereka.

MMI mengklaim, bahwa penerapan syariat Islam merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang terbelakang dan teraniaya. Mereka juga meyakinkan bahwa penerapan sistem Islam sebenarnya bukan hanya kepentingan umat Islam, tetapi juga non-Muslim yang akan diperlakukan secara adil dalam pemerintahan Islam. Penerapan hukum Islam adalah bagian penting keislaman seseorang dan oleh karena itu adalah sebuah kebutuhan esensial manusia secara umum. Untuk itu, bagi MMI penegakan syariat Islam adalah tuntutan mutlak. Bagi mereka hanya ada dua alternatif, yaitu “penerapan hukum Islam atau mati dalam *jihad* di jalan Allah demi tegaknya syariat Islam”.

MMI ditangan Ba’asyir dikenal sebagai ormas puritan dan fenomenal. Pada Agustus 2006, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei, bahwa MMI menempati posisi keempat setelah NU, Muhammadiyah, dan FPI yang mendapat dukungan dari masyarakat akan eksistensi dan peranannya. Selama dua periode dibawah kepemimpinan Ba’asyir MMI selalu menunjukkan taringnya. Mereka selalu berada di garda depan untuk mengawal pencegahan anti kemaksiatan, minuman keras, aliran sesat, dan dukungan moral atas trio bomber Bali; Amrozi, Imam Samudra, dan Muchlas.

2.1.10. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

Dalam buku Ideologi Politik PKS “Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen” disebutkan bahwa bibit-bibit PK muncul sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu, bibit-bibit PK adalah para aktivis dakwah kampus. Para aktivis dakwah kampus tersebut mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Lembaga ini kerap menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, seperti pengajian untuk mahasiswa. Aktivitas keagamaan lembaga tersebut, lebih bersifat rahasia atau lebih sering dilakukan secara diam-diam dan jika lembaga tersebut menyelenggarakan pengajian untuk banyak orang, mereka berkamufase dengan mengatasnamakan kegiatan mahasiswa.

Hal ini sengaja mereka lakukan karena pada masa itu, rezim yang berkuasa adalah rezim Soeharto. Rezim ini dikenal dengan represif terhadap gerakan keagamaan. Akan tetapi, situasi tersebut mulai berubah pada era 1990-an saat Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam sebagai sekutu. Sejak saat itulah, gerakan yang semula bernama *Usrob* kini berganti nama menjadi *Ikhwan* dan mereka menamai aktivitas mereka dengan sebutan *Tarbiyah*.

Secara garis besar, gerakan ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu pertama DDII (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia) dengan tokoh utamanya Mohammad Natsir. Kedua, aktivis LDK dan Rohis. Ketiga, alumnus perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Timur Tengah. Keempat, aktivis ormas Islam. Kelima, dai lulusan pesantren. Lima elemen tersebut bergerak bersama-sama,

saling mendukung dan saling menguatkan dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Dari lima elemen tersebut, elemen yang paling berperan besar bagi lahirnya gerakan ini adalah DDII. Para aktivis DDII yang merupakan mantan aktivis Partai Masyumi yang dibubarkan pada awal masa pemerintahan Soeharto ini, menjadi inisiator awal berdakwah melalui kampus dan sekaligus peletak dasar-dasar strategi dakwah kampus. Selanjutnya, lahirlah LDK yang kemudian banyak bergerilya di dalam kampus. Kehadiran LDK tersebut terbukti telah menyumbangkan berbagai kemajuan umat Islam, misalnya lembaga ini bekerjasama dengan DDII banyak mengusahakan pembangunan masjid di sekitar kampus guna dipakai untuk berbagai aktivitas dakwah. Selanjutnya, gerakan Tarbiyah membangun banyak lembaga, seperti lembaga pendidikan Nurul Fikri, lembaga dakwah Khoiru Ummah, kelompok kesenian nasyid, dan majalah *Sabili*. Selain itu, gerakan Tarbiyah juga menyebarkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka melalui buku-buku yang diterbitkan antara lain oleh penerbit Gema Insani Press (GIP), Pustaka Al-Kautsar, Era Intermedia, dan Asy-Syamiil.

Pada pertengahan tahun 1990, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tumbang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para aktivis Tarbiyah. Setelah berdiskusi cukup alot dan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berdakwah dan berjuang lewat jalur politik. Akhirnya, pada agustus 1998, para aktivis Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK), sebuah parpol yang berasaskan Islam. Selang setahun paska didirikan, parpol ini berhasil mengikuti pemilu dan mampu menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari

keseluruhan jumlah suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Pada pemilu 2004, parpol yang semula bernama PK kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada tahun 2002 ini, mampu meningkatkan jumlah suara secara signifikan. Pada pemilu 2004, PKS meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR. Bahkan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid berhasil menduduki jabatan Ketua MPR.

Secara umum, ideologi keagamaan PKS adalah Islam modernis yang dikatakan penulis memiliki afiliasi dengan gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia. Ciri utama gerakan Wahabi ini adalah upaya menentang keras segala bentuk peribadatan Islam yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sebenarnya, ideologi gerakan Wahabi ini telah berkembang luas di Indonesia sejak awal abad ke 19, ditandai dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang populer dengan penentangannya terhadap hal-hal yang berbau *tahayul*, *bidah*, dan *khufurat*. Meskipun demikian, secara tersirat penulis mengatakan bahwa gerakan dakwah PKS ini lebih berbahaya dari gerakan dakwah.

Muhammadiyah, karena sesungguhnya ideologi keagamaan PKS lebih memiliki keterkaitan yang erat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan yang kontroversial. Kedua tokoh penting Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan Al Bana dan Sayyid Quthb, tewas dibunuh karena gerakan dakwahnya yang dianggap subversif dan mengancam

keutuhan negara Mesir. Organisasi ini memang terjun ke politik praktis. Organisasi ini kerap mengkritik hebat kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan aturan Islam. Organisasi ini juga dituduh ikut serta dalam upaya penggulingan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh Mesir, pengeboman dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Akibatnya, organisasi ini ditekan habis-habisan oleh Pemerintah Mesir bahkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati.

Jemaah Tarbiyah mengadopsi tahapan-tahapan dakwah Ikhwan al-Muslimin tersebut. Setelah Jamaah Tarbiyah didirikan tahun 70-an akhir atau 80-an awal dan memfokuskan diri pada *mibwar tanzbimi*, memusatkan perhatian pada islamisasi pribadi-pribadi dan pembentukan keluarga-keluarga muslim, pada tahun 1998 Ustadz Hilmi di hadapan para kader mendeklarasikan bahwa Jamaah Tarbiyah memasuki *mibwar sya'bi*, yaitu orbit atau tahapan pembentukan masyarakat yang islami. Sebagai implementasinya, para kader didorong untuk menjalin interaksi seluas-luasnya mulai dari berpartisipasi dalam rapat RT, arisan di lingkungan, dan lain-lain, hingga mendirikan berbagai *muasasah* untuk mewadahi berbagai kiprah kemasyarakatan para kader Jamaah Tarbiyah. Tercatat menjamurnya berbagai lembaga sosial-kemasyarakatan milik para kader di akhir 80-an dan di era 90-an seperti Yayasan Ibu Harapan, Yayasan Ibu Bahagia, Taman Quran Rabbi Radhiyya (Taman Kanak-Kanak Al-Quran pertama), Nurul Fikri (bimbingan belajar, kemudian mengembangkan pula kursus-kursus, sekolah formal, klinik kesehatan, beasiswa kepemimpinan untuk mahasiswa dan lain-lain), *Khairu Ummah* (dakwah tabligh) dan masih banyak lagi.

Dalam rencana awal yang dicetuskan tahun 1997, para aktivis Jamaah Tarbiyah baru akan memasuki *mibwar mu'asasi*, terjun ke politik dengan fokus pada *islahul hukumah* (perbaikan pemerintahan) pada tahun 2010. Karena itu rencana tersebut dinamakan “Visi 2010”. Namun, kemudian terjadilah Reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan membuka peluang mendirikan partai politik dengan azas yang beragam, termasuk azas Islam.

Pada saat itu, setidaknya terdapat tiga alternative bentuk struktur yang dipertimbangkan yaitu ormas, ormas yang memiliki wahana berupa partai politik. Pertimbangan jumlah SDM yang terbatas membuat pilihan ormas yang memiliki sayap politik menjadi tidak *feasible* untuk dilakukan. Sementara itu, pilihan menjadi ormas saja juga dipandang tidak memadai untuk memanfaatkan momentum yang menyediakan peluang untuk mereformasikan kondisi politik Indonesia.

Setelah diputuskan menjadi partai dan berjalan hingga saat ini, bukan berarti sudah tidak ada perdebatan di internal PKS tentang sikap politik yang harus diambil. Ada sementara kalangan yang mendorong PKS untuk bersikap lebih militan dan heroik dengan keluar dari koalisi partai-partai Pemerintah dan menjadi oposisi. Padahal pilihan menjadi oposisi belum tentu lebih baik untuk dakwah, karena terdapat peluang berbagai cap negatif, seperti ekstrim, fundamentalis, dan sebagainya akan diselamatkan kepada PKS.

Perubahan Jamaah Tarbiyah menjadi partai mau tidak mau membawa konsekuensi perubahan paradigm dakwah yang dijadikan rujukan oleh para kadernya, karena dakwah memasuki *mibwar* baru, yaitu *mibwar muasasi*. Sangat disadari bahwa perubahan tersebut tidak mudah karena terdapat rintangan yang jauh lebih kompleks ketimbang sebelumnya, ketika dakwah mungkin dibatasi oleh tembok-tembok masjid. Dalam konteks ini terdapat keharusan untuk mengubah strategi gerakan. Tuntutan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia. keterbatasan prasarana dan sarana yang dihadapi oleh Jamaah Tarbiyah sebelum menjadi partai merupakan tantangan masa itu, sebaliknya kebebasan dan keterbukaan pasca reformasi termasuk di dalamnya peluang-peluang para kader untuk tampil di publik, juga merupakan tantangan yang khas untuk masa sekarang.

Para kader Jamaah Tarbiyah lalu mendirikan PK yang kemudian menjadi PKS. Disamping itu, para kaderpun harus menerima realita, misalnya kekuatan lobi Yahudi di Amerika dan di seluruh dunia yang belum bisa ditumbangkan oleh kaum muslimin sehingga dibutuhkan strategi yang lebih cerdas dari pada sekitar konfrontasi langsung.